

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi pencapaian target kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Padang tahun 2019, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Cakupan kepesertaan JKN Kota Padang tahun 2019 belum mencapai target dan dikategorikan dibawah target karena perpindahan penduduk cukup tinggi setiap tahunnya, sebagian besar masyarakat Kota Padang memiliki ekonomi lemah dan berpendapatan tidak tetap, masih ada masyarakat yang belum terpapar sosialisasi dan sistem pendataan penduduk masih kurang maksimal.
2. Tren kepesertaan JKN di Kota Padang tahun 2014-2019 menunjukkan hasil yang beragam. Persentase cakupan kepesertaan di dominasi oleh kepesertaan segmen PBI APBN. Pertumbuhan kepesertaan yang terus mengalami peningkatan adalah segmen PBPU. Persentase pertumbuhan pada segmen PPU mengalami gelombang naik turun setiap tahunnya. Sedangkan segmen BP (Bukan Pekerja) memiliki cakupan kepesertaan terendah setiap tahun
3. Strategi/upaya yang telah dilakukan dalam rangka yang mendukung pencapaian kepesertaan JKN di Kota Padang adalah sosialisasi mengenai JKN secara langsung dan tidak langsung oleh Dinas Kesehatan bersama BPJS Kesehatan dan instansi terkait lainnya.
4. Kewajiban pendaftaran peserta JKN untuk seluruh anggota dalam KK diterapkan di Kota Padang, namun terdapat kendala berupa komplain dari masyarakat karena sebagian besar masyarakat Kota Padang memiliki kemampuan ekonomi yang lemah.

5. Pembentukan kader JKN di Kota Padang merupakan wewenang BPJS Kesehatan dan sudah dibentuk pada tahun 2017 dengan 4 fungsi salah satunya fungsi kepesertaan.
6. Tidak ada penambahan kuota PBI APBN di Kota Padang pada tahun 2019 karena penambahan kuota dilakukan secara nasional oleh Kementerian Sosial.
7. Pendaftaran peserta JKN bagi pekerja sektor informal (PPU) dilakukan oleh perusahaan masing-masing. Namun, tidak semua Pemberi Kerja dan atau Badan Usaha yang terdapat di Kota Padang patuh dalam mendaftarkan dirinya dan pegawainya sebagai peserta JKN.
8. Sosialisasi kepesertaan JKN bagi Bukan Pekerja (pensiunan, veteran dan sebagainya) di Kota Padang sudah dilakukan melalui pertemuan tatap muka pada saat rapat atau ada *event-event* penting, perkumpulan dengan kelompok pensiunan dan pemberi kerja di Kota Padang, serta melalui surat.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian evaluasi pencapaian target kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Padang tahun 2019, antara lain :

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang
 - a. Diharapkan bagi Dinas Kesehatan dapat mengedukasi dan melakukan sosialisasi secara masif terkait pentingnya memiliki jaminan kesehatan kepada masyarakat mandiri agar mau mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta JKN.
 - b. Diharapkan agar Dinas Kesehatan dapat melakukan verifikasi dan validasi data peserta PBI APBD secara maksimal dan melakukan

penggantian peserta yang sudah mampu dengan yang benar-benar tidak mampu dan miskin.

2. Bagi Dinas Sosial Kota Padang

- a. Diharapkan agar Dinas Sosial dapat melakukan perbaikan sistem pendataan secara maksimal sehingga bisa didapatkan data kependudukan yang valid dan lengkap serta menghapus data peserta PBI yang sudah tidak layak menerima dan mengganti dengan peserta yang benar-benar tidak mampu dan miskin.
- b. Diharapkan agar Dinas Sosial dapat melakukan edukasi secara maksimal kepada kelurahan supaya pihak kelurahan lebih tegas dan jujur dalam melakukan pendataan penduduk penerima PBI tanpa adanya unsur politik praktis.

3. Bagi BPJS Kesehatan Cabang Padang

Diharapkan bagi BPJS Kesehatan dapat melakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada Pemberi Kerja atau Badan Usaha tentang kewajibannya dan sanksi yang harus dipenuhi jika tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta JKN dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk penegakan hukum kepatuhan dan sanksi yang tegas bagi yang melanggar.

